



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Oktober 2017

Halaman: 1

PENDAFTARAN PESERTA PEMILU 2019
Partai Sempat Menyerah, Komisioner Tetap Semangat

Detik-detik terakhir perbaikan berkas pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019 adalah saat-saat genting dan melelahkan, baik untuk fungsionaris partai maupun komisioner KPU. Sistem baru dalam pendaftaran kontes pemilu mengundang suara cukup merepotkan. Berikut laporan wartawan Harian Jogja Ujang Hasanudin.

Satu jam sebelum Selasa (17/10) tengah malam, Kantor KPU Kota Jogja di Jl. Magelang, Kecamatan Tegalrejo, masih ramai. Lima komisioner komisi pemilihan tak ada yang mengantuk, semuanya meneliti tumpukan berkas. Padahal, biasanya jam kerja mereka hanya sampai pukul 16.00 WIB.

Tangan Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto menggenggam gagang kaca pembesar yang dipakai untuk membantu membaca tulisan yang tertera di e-KTP dan kartu tanda anggota parpol. Meski sudah dibesarkan lewat kaca bengkala, ada saja dokumen yang sukar dibaca sehingga harus diabaikan.

Di tengah kesibukan itu, beberapa pengurus Partai Indonesia Bekerja (Pika) dan Partai Hanura tergopoh-gopoh mendatangi Gedung KPU Kota Jogja. Kader dua partai itu harus bolak-balik karena berkas pendaftaran masih kurang. Sehari sebelumnya, fungsionaris Pika dan Hanura sudah mendatangi KPU, namun mereka pulang tanpa tanda terima karena berkas yang mereka setorkan tidak sesuai dengan data yang tercantum di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Tanda terima pendaftaran menjadi bukti yang digunakan KPU untuk meneliti administrasi partai yang sudah mendaftar. Adapun Sipol merupakan pusat data yang dibuat KPU untuk pendaftaran peserta pemilu kontes suara pada 2019.

Total ada empat partai yang berkasnya dikembalikan. Selain Pika dan Hanura, ada PAN dan Partai Berkarya. Mereka diberi kesempatan memperbaiki berkas selama satu kali 24 jam. Perpanjangan waktu tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran KPU RI No.585/2017 tentang Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

Komisioner KPU pun harus menunggu hingga tengah malam. Batas waktu perbaikan adalah pukul 24.00 WIB. Berkas milik PAN dan Berkarya sudah dilengkapi jauh sebelum tenggat. Sementara, Pika memanfaatkan injury time.

● Lebih Lengkap Halaman 8

Partai Sempat...

Proses pendaftaran Pika bermasalah. Data yang disorotkan ke KPU tak sinkron dengan Sipol. Ketua DPC Pika Kota Jogja, Yuliar Purwantoro, bahkan sudah menyerah. "Sudah mentok tidak bisa diperbaiki lagi," kata Yuliar Purwantoro kepada Ketua KPU, Pika hanya menyerahkan 520 nama anggota, 896 kartu tanda anggota, dan 415 KTP atau surat keterangan. Sementara, kartu tanda anggota Pika Kota Jogja yang ada di Sipol mencapai 1.131.

KPU akhirnya menerima pendaftaran karena keanggotaan partai anjay itu sudah melampaui batas minimal, yakni 410 anggota atau 1/1.000 populasi Kota Jogja.

Bukan Beban

Wawan Budianto mengatakan banyaknya partai yang mendaftar di menit-menit akhir tidak menjadi persoalan. "Karena sudah ada aturan kami sudah mengantisipasi. Kami sama sekali tidak melihat itu sebagai beban," ucap dia.

Menurut Wawan persoalan beberapa partai saat pemberkasan adalah ketidaksesuaian jumlah keanggotaan yang diserahkan dengan yang tertera di Sipol. KPU sudah mengundang perwakilan partai dalam sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian Sipol dan pemberkasan sebelum pendaftaran dibuka. "Hampir semua perwakilan partai hadir," kata dia.

KPU juga membuka forum konsultasi setiap hari. Menurut Wawan, banyak yang menanyakan syarat-syarat pemberkasan. "Ih, kesulitan tetap saja ada. Pendaftaran partai berbasis teknologi informasi sebenarnya sudah dilakukan sejak lima tahun lalu, tetapi baru efektif sekarang," kata dia.

Sekretaris DPD PKS Kota Jogja, Bambang Anis Jalumurti mengatakan partainya sebenarnya sudah memiliki data anggota berbasis jaringan. Namun ada perbedaan format ketika diunggah melalui Sipol. "Jadi harus input ulang lagi satu-satu menyalin, ini yang bikin lama," kata Bambang.

Selain itu, ada anggota yang sudah merekam data namun belum mendapat e-KTP. Sementara, KTP lama ternyata tidak diakui oleh KPU sehingga kadernya harus pergi ke Kantor Pencatatan Sipil untuk meminta surat keterangan pengganti e-KTP. Problem itu menyebabkan PKS baru mendaftar menjelang penutupan.

Sekretaris DPD PAN, Rifki Listianto, juga mengeluhkan masalah serupa. Menurutnya butuh waktu yang tidak sebentar untuk menyamakan data yang diunggah di sipol dengan kartu tanda anggota parpol dan e-KTP. "Kami harus beberapa kali memperbaiki berkas pendaftaran," ujar dia.

Dari 18 partai politik di Kota Jogja, 16 partai resmi mendaftar, yakni PAN dengan 3.358 anggota, Golkar dengan 1.895 anggota, Perindo dengan 1.136 anggota, Gerindra 876 anggota, PKS 833 anggota, PDIP 623, Berkarya 544 anggota, PPP 521 anggota, Nasdem 487 anggota, Garuda 475 anggota, PSI 456 anggota, Demokrat 447 anggota, PBB 429 anggota, dan PKPI 426 anggota.

(hasanudin@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005